



SURVEY BAROMETER KORUPSI ACEH

diterbitkan oleh :



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**
the global coalition against corruption

SURVEY BAROMETER KORUPSI ACEH



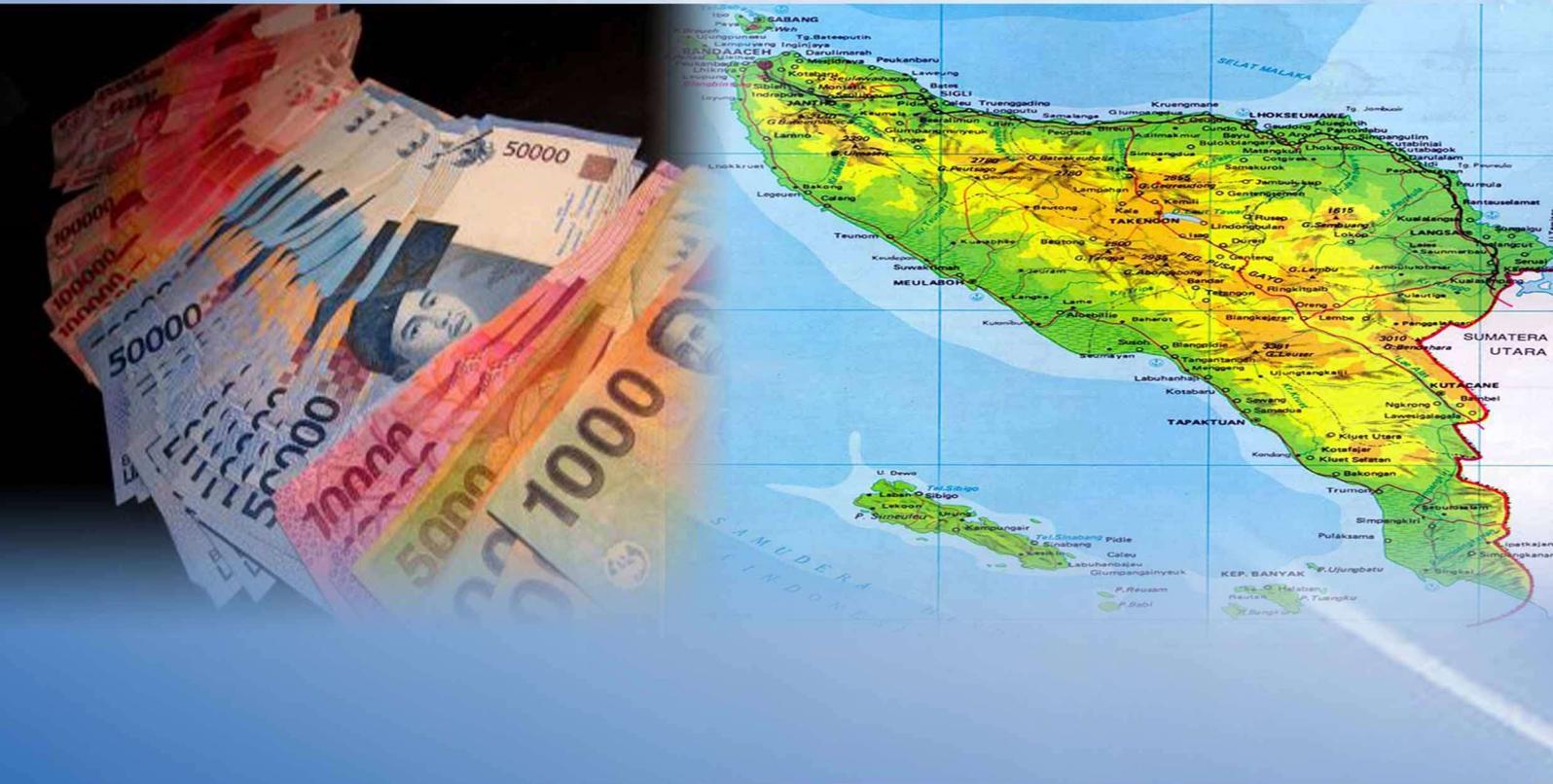
diterbitkan oleh :



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

Indonesia
the global coalition against corruption

SURVEY BAROMETER KORUPSI ACEH



diterbitkan oleh :



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption

SURVEY BAROMETER KORUPSI ACEH

diterbitkan oleh :



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption

SURVEY BAROMETER KORUPSI ACEH

Diterbitkan Oleh :
Transparency International Indonesia

Penulis & Riset :

Editor :

Dicetak
Juni 2010

ISBN :

Alamat Penerbit :
Jl. Senayan Bawah No.17, Jakarta 12180, Indonesia
Telephone : (6221) 720 8515 **Fax :** (6221) 726 7815
Email : info@ti.or.id **Website :** www.ti.or.id

HARAPAN UNTUK ACEH YANG LEBIH BAIK

Siapapun yang pernah ke Aceh pada hari-hari pertama tsunami akan kagum melihat perubahan yang saat ini terlihat. Siapapun yang pernah masuk jauh ke pelosok Aceh sebelum MOU Helsinki akan merasa takjub melihat kedamaian yang kini tercipta. Jika tidak pernah ke Aceh sebelumnya, mungkin anda tidak akan merasakan anugerah perdamaian dan pembangunan yang ada. "Anda harus mengalami, untuk mengetahui kebenarannya," demikian Edmund Husserl, seorang filsuf dunia dari Jerman.

Setelah lima tahun pasca tsunami dan 4 tahun pasca MOU Helsinki, TI Indonesia bergerak membuat survey untuk mengukur apakah perubahan di Aceh juga menjangkau persoalan korupsi. Hasilnya, mayoritas suara publik melihat bahwa korupsi masih membelit bumi Aceh hingga saat ini. Pertanyaannya, bukan apa hasil dan bagaimana survey ini dilakukan. Tapi bagaimana kita memaknai hasil survey ini.

Pertama, hasil penelitian di 23 kabupaten/Kota yang disebut Survey Barometer Korupsi Aceh ini menunjukkan bahwa harapan warga Aceh demikian tinggi terhadap pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan. Keadaan ini mestinya tidak mengherankan karena seperti dikemukakan dalam studi Philippe Le Billion (2008), transisi pasca konflik dan bencana yang rentan terhadap korupsi berbanding lurus dengan tingginya harapan warga terhadap pemerintah. Gubernur Aceh dapat dinilai sudah melakukan respons cepat dengan melakukan rekrutmen pejabat Pemprov melalui *fit and proper test*, pembentukan TAK PA untuk mempercepat koordinasi pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Artinya sudah banyak yang sudah dilakukan, namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan agar persoalan korupsi dapat benar-benar diberantas untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga di Aceh.

Kedua, Aceh mengalami tantangan yang hampir-hampir tidak ada bandingannya dalam sejarah, yakni transisi menuju damai, transisi menuju sejahtera, dan transisi menuju demokrasi yang terjadi dalam tempo bersamaan dalam skala waktu yang dipadatkan. Transisi konflik menuju damai dan darurat bencana menuju rehabilitasi dipenuhi peluang penyimpangan. Meskipun tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang ada memiliki kesadaran tentang bahaya korupsi, namun besaran tantangan menjadi faktor melambatnya segala inisiatif yang dilakukan untuk berdampak bagi

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Aceh, birokrasi lama masih berjalan, kepemimpinan politik baru saja berganti, masih lambatnya revitalisasi lembaga-lembaga lokal untuk turut memantau proses transisi, masih terfragmentasinya kekuatan masyarakat sipil, belum padunya lembaga pengawasan di banding besaran dana yang dikelola.

Di lain pihak posisi masyarakat juga masih ambivalen. Dalam masa transisi, terbukalah peluang untuk menyatakan aspirasi. Namun bersuara kritis dan berharap saja tidak cukup.

Dalam kenyataannya, suara dan harapan itu lebih banyak berhenti menjadi keprihatinan semata. Belum cukup upaya menerjemahkannya menjadi keterlibatan penuh dalam ikut mempengaruhi proses yang terjadi. Trauma pasca konflik diiringi bayang-bayang teror yang masih berjalan membuat kelompok-kelompok pemantau proses pembangunan dan proses politik di Aceh yang diupayakan di mana-mana oleh berbagai pihak belum lagi banyak membuahkan hasil. Membaca hasil survey yang dilakukan oleh para anak muda di Aceh Institute bersama TI Indonesia ini selalu harus disandingkan dengan bacaan kita tentang sejarah dan konteks Aceh saat ini. Memisahkannya, bak menghidangkan pisang goreng panas tanpa kopi hangat Ulee Kareng. Menyandingkannya, membuat hidangan dapat dicerna sesuai citarasa terbaik.

Akhirnya, saya mengutip pernyataan juru bicara Partai Aceh Tgk Adnan Beuransyah dalam salah satu diskusinya bersama sejumlah wartawan, aktivis muda Aceh dan TI Indonesia. Pasca kemenangan Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif tahun lalu, Tgk Adnan Beuransyah menyatakan bahwa, bagaimanapun tantangannya, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada, “saatnya melakukan perubahan nyata untuk keamanan dan kemakmuran warga Aceh. Dan, masa transisi harus segera diakhiri.”

Survey ini semoga dapat menjadi acuan yang dengannya perubahan di masa depan dapat diukur. Semoga harapan Aceh yang lebih baik menjadi kenyataan dalam tempo yang tidak lama lagi.

Sekretaris Jenderal
Transparency International Indonesia

Teten Masduki

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2 . Tujuan Survey

BAB II. METODOLOGI PENELITIAN 10

II.1. Lokasi Survey

II.2. Jenis Data dan alat Pengumpulan Data

II.3. Teknik Sampling

II.4. Tahapan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

II.5. Situasi Enumerator pada Pelaksanaan Survey di Lapangan

II.6. Proses Verifikasi Hasil Survey

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN 19

III.1. Performa Pemerintahan

III.2. Apakah Kondisi Hari ini Lebih Baik?

III.3. Apakah Qanun Merubah Keadaan ?

III.4. Solusi dan Rekomendasi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Responden di tiga kawasan Provinsi Aceh

Tabel 2. Sebaran Responden Mahasiswa atau Pelajar

Tabel 3. Sebaran Responden Pegawai Negeri Sipil

Tabel 4. Sebaran Responden Swasta atau Wiraswasta

Tabel 5. Sebaran Responden Tokoh (Agama, Masyarakat Adat)

Tabel 6. Sebaran Responden Masyarakat Tidak Bekerja

DAFTAR TABEL

Halaman

Gambar 1. Prestasi pemerintah eksekutif provinsi Aceh dalam pemberantasan korupsi

Gambar 2. Persepsi terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah di Aceh

Gambar 3. Stratifikasi tingkat korupsi lembaga-lembaga yang ada

Gambar 4. Wajah korupsi sebelum dan setelah Tsunami

Gambar 5. Kondisi korupsi sebelum dan setelah MoU Helsinki

Gambar 6. Hubungan penerapan qanun terbaru terhadap pemberantasan korupsi

Gambar 7. Skala prioritas penanggulangan korupsi

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Praktik korupsi telah terbukti merugikan banyak bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti dampak negatifnya terhadap perbaikan iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga meningkatkan kemiskinan. Berbagai cara telah diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengurangi praktik suap di kalangan pengusaha dan aparat pemerintah. Permasalahannya adalah seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi khususnya di era otonomi daerah yang telah memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah, untuk mengurangi praktik korupsi antara pengusaha dan pemerintah.

Provinsi Aceh mengalami banyak perubahan sejak tsunami 2004 dan ditandatanganinya kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Banyaknya dana yang masuk ke Aceh dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami pada satu sisi adalah sebuah anugerah yang membawa kebaikan bagi Aceh. Namun sayangnya pada sisi yang lain juga menciptakan berbagai persoalan terkait dengan korupsi. Untuk memahami situasi yang sesungguhnya dibalik perkembangan yang ada terkait dengan program rekonstruksi pasca tsunami dan program reintegrasi pasca konflik di Aceh tentunya diperlukan analisa terhadap data-data yang ada secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk alasan inilah penelitian ini dilakukan.

Kegiatan ini merupakan survey untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat di Aceh dalam kasus korupsi yang terjadi pada lembaga atau instansi pemerintahan di level di propinsi Aceh. Selain itu, survey ini juga berusaha menangkap aspek -aspek gender, kasus korupsi dilihat dari persentase perempuan dan laki-laki. Untuk menghindari bias, pemilihan responden juga dilakukan dalam beberapa cluster , yaitu kelompok mahasiswa/pelajar , kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS), kelompok pegawai swasta/wiraswasta, kelompok tokoh masyarakat dan kelompok TNI atau Polri.

I.2. Tujuan Survey :

Survei Barometer Korupsi Aceh bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat di Aceh -yang diyakini akan diwakili oleh berbagai unsur yang ada--terhadap situasi korupsi yang terjadi pada lembaga atau institusi pemerintahan di level di propinsi Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

II. 1. Lokasi Survey

Survey Barometer Korupsi Aceh ini dilaksanakan di 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Ke-23 kabupaten/kota akan dibagi ke dalam tiga (3) kawasan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu :

1. Kawasan Utama meliputi Banda Aceh dan Aceh Besar. Disebut kawasan utama karena diyakini bahwa masyarakat di kawasan ini relative lebih bersentuhan dengan lembaga atau institusi pemerintahan di level provinsi di Aceh.
2. Kawasan Penyangga , meliputi Sabang, Pidie dan Bireun. Disebut kawasan penyangga karena ketiga daerah ini plus Aceh Besar sudah menandatangani pakta integritas anti korupsi. Dan sejauh pemantauan kantor Transparency International Indonesia (TII) di Aceh, ketiga distrik ini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
3. Kawasan Lainnya, meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe dan Pidie Jaya.

II.2. Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang bersifat kualitatif. Data ini akan menjadi bagian utama dalam survey yang akan dianalisis. Namun demikian untuk melengkapi laporan naratif juga dibutuhkan data-data sekunder, seperti qanun tentang korupsi, qanun tentang Syariat Islam dan sebagainya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

II.3. Teknik Sampling

Metode pengambilan sampel dilaksanakan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah *Stratified Random Sampling*. Yang menjadi strata adalah wilayah atau kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dibagi menjadi tiga strata atau kawasan. Strata pertama sebagai kawasan pertama (kawasan utama), strata kedua sebagai kawasan penyangga dan strata ketiga sebagai kawasan lainnya..

Tahap kedua, penarikan sampel dilakukan dengan cara *Cluster Random Sampling*. Yang menjadi cluster adalah kelompok responden. Responden diambil dari enam (6) cluster. Cluster pertama adalah kelompok mahasiswa atau pelajar sebanyak 20 persen, kelompok pegawai negeri sipil sebanyak 20 persen, kelompok pegawai swasta atau wiraswasta sebanyak 20 persen, kelompok tokoh (agama, masyarakat dan adat) sebanyak 25 persen, kelompok TNI atau POLRI sebanyak 5 persen dan kelompok masyarakat yang tidak bekerja sebanyak 10 persen. Jumlah responden untuk setiap kabupaten/kota yang disurvei terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Responden di Tiga Kawasan Provinsi Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Total Responden	Total Responden, <i>Actual</i>
1.	Banda Aceh	200	200
2.	Aceh Besar	200	192
3.	Sabang	100	100
4.	Pidie	100	100
5.	Bireun	100	100
6.	Aceh Utara	80	80
7.	Lhoksemawe	80	80
8.	Aceh Timur	80	80
9.	Aceh Jaya	80	90
10.	Aceh Selatan	80	86
11.	Aceh Barat	80	77
12.	Pidie Jaya	80	80

13.	Bener Meriah	80	8 0
14.	Aceh Tengah	80	8 0
15.	Gayo Lues	80	8 0
16.	Aceh Tenggara	80	8 0
17.	Langsa	80	8 1
18.	Aceh Tamiang	80	7 8
19.	Singkil	80	8 0
20.	Subulussalam	80	8 0
21.	Simeulue	80	7 5
22.	Aceh Barat Daya	80	8 0
23.	Nagan Raya	80	8 1
TOTAL		2140	2140

Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh enumerator yang dikoordinir oleh Tim kerja Aceh Institute. Responden yang di wawancarai terdiri dari 6 kelompok profesi. Sebaran pemilihan responden dapat dilihat pada Tabel 2.2 sampai 2.6 di bawah ini :

Kriteria sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Proporsi laki-laki atau perempuan adalah 50:50
2. Berusia di atas 17 tahun
3. Persentase berdasarkan profesi :
 - a. Mahasiswa / pelajar (20%)
 - b. Pegawai Negeri Sipil (20%)
 - c. Pegawai Swasta/Wiraswasta (20%)
 - d. Tokoh (agama, masyarakat dan adat)(25%)
 - e. TNI atau Polri (5%)
 - f. Tidak Bekerja (10%)

Tabel 2.2. Sebaran responden Mahasiswa atau pelajar

Instansi/ Kel 1		Instansi/ Kel 2		Instansi/ Kel 3		Instansi/ Kel 4		Instansi/ Kel 5		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%

Tabel 2.3. Sebaran responden Pegawai Negeri Sipil

Instansi/ Kel 1		Instansi/ Kel 2		Instansi/ Kel 3		Instansi/ Kel 4		Instansi/ Kel 5		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%

Tabel 2.4. Sebaran responden Swasta atau Wiraswasta

Instansi/ Kel 1		Instansi/ Kel 2		Instansi/ Kel 3		Instansi/ Kel 4		Instansi/ Kel 5		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%

Tabel 2.5. Sebaran responden Tokoh (agama, masyarakat dan adat)

Daerah 1		Daerah 2		Daerah 3		Daerah 4		Daerah 5		Daerah 6		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%

Tabel 2.5. Sebaran responden Masyarakat Tidak Bekerja

Daerah 1		Daerah 2		Daerah 3		Daerah 4		Daerah 5		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	10%

II.4. Tahapan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan pengumpulan , pengolahan dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator, selanjutnya kuesioner yang telah diisi oleh responden diperiksa ulang oleh enumerator sebelum diserahkan ke Tim Survey. Koordinator Program bersama statistian melakukan verifikasi dan cleaning data terhadap kuesioner yang telah dikumpulkan oleh enumerator. Setelah kuesioner selesai diverifikasi, selanjutnya kuesioner dientri oleh petugas entri. Entri data langsung dikoordinir oleh statistian bekerjasama dengan koordinator program. Setelah entri data selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan cleaning data untuk data yang telah di entri . Cleaning data selesai, baru dilakukan pengolahan data, analisis dan interpretasi data. Hasil analisis dan interpretasi data di buat dalam satu laporan oleh Koordinator program.

II.5. Situasi Enumerator pada Pelaksanaan Survey di Lapangan

Selama pengumpulan data di lapangan, ditemukan beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh enumerator, diantaranya :

1. Responden dari profesi TNI/ Polri sulit diperoleh. Di Nagan Raya dan Banda Aceh diperlukan surat khusus untuk ke Kapolres.
2. Sebagian besar responden keberatan menyebutkan nama, nomor hp, dan alamat lengkap. Disebabkan enumerator melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat maka kita memperoleh identitas sebagian besar dari responden. Ada satu enumerator yang kadang-kadang mengambil data dengan alasan penelitian mahasiswa, karena responden sulit memberikan data.
3. Proporsi seimbang dari total responden berdasarkan jenis kelamin sering sulit diperoleh terutama di TNI/ Polri. Di daerah-daerah jumlah TNI/ Polri laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Enumerator melakukan usaha-usaha optimal untuk keseimbangan responden berdasarkan jenis kelamin ini.
4. Enumerator sering tidak mengerti cara mengisi pertanyaan Q9 yaitu mengenai prioritas cara pemberantasan korupsi. Enumerator perlu waktu khusus untuk menjelaskan dan kemudian responden menjadi mengerti.

5. Pada pertanyaan Q1 dan Q2, enumerator harus berusaha memotivasi responden untuk berkata yang sebenarnya, karena responden biasanya cenderung ingin mengatakan tidak ada komentar. Saran dari Enumerator:
- Pihak TI harus sangat hati-hati dalam mengecek kebenaran data kuesioner ke responden, sebab enumerator telah BERJANJI kepada responden bahwa identitas responden akan DIRAHASIAKAN.

II.6 Proses Verifikasi Hasil Survey

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan data yang diambil adalah benar dan valid adalah dengan melakukan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kuesioner dan verifikasi data di lapangan. Verifikasi data kuesioner dilaksanakan oleh Tim Aceh Institute sedangkan verifikasi data lapangan dilaksanakan oleh Tim dari TII. Demi menghindari hal-hal yang mengakibatkan rasa kurang nyaman bagi para enumerator, dan khususnya terhadap para responden kita, dalam proses verifikasi hasil survey, berikut disediakan protokol standar verifikasi yang bisa dijadikan pedoman bagi petugas verifikasi yang ditunjuk:

A. Untuk memverifikasi responden [Ini yang utama]

Pertanyaan kunci yang ingin digali Apakah responden bersangkutan pernah ditemui oleh si Enumerator.

Langkah-Langkah

- a. Mulai dengan salam.
- b. Verifikasi nama orang yang ingin diajak bicara [Nama dan jenis kelamin sudah bisa diidentifikasi dari awal sebelum menelepon].
- c. Perkenalkan diri sebagai Staf Senior di Aceh Institute yang sedang memastikan kinerja anggotanya di lapangan.
- d. Bangun sedikit rapport [kesan bersahabat untuk membangun trust dan kenyamanan].
- e. Masuk ke pertanyaan-pertanyaan [mulai dengan kesan izin/permisi].

- f. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini dan berikan kesan bahwa kontribusi bapak/ibu sangat berharga bagi membangun Aceh yang lebih baik.

Catatan:

- a. Diutamakan menelepon adalah perempuan, atau perhatikan faktor gendernya.

Tingkat reseptabilitas komunikasi adalah:

1. Perempuan menelepon laki-laki = 90%
2. Perempuan menelepon perempuan = 70%
3. Laki-laki menelepon perempuan = 70%
4. Laki-laki menelepon laki-laki = 50%

- b. Kalau bisa menggunakan bahasa lokal [Aceh, Jamee, Gayo, atau Alas dan lain-lain, akan lebih baik]

Contoh:

Assalaamu alaikum... Bu.

Boleh bicara dengan Ibu Wati? [Kalau yang bersangkutan adalah Ibu Wati, maka langsung masuk ke tahap selanjutnya, bila bukan Ibu Wati, maka mohon kesediaan untuk dihubungkan dengan beliau]

Apa kabar Ibu Wati? [tunggu jawaban] mohon maaf nih, Bu... sedikit mengganggu... saya Udin dari Aceh Institute di Banda Aceh, ini nomor telepon saya yang bisa ibu hubungi. Saya hanya mau mengecek kinerja staf lapangan kami... Boleh tanya-tanya dikit bu ya? 1 menit aja [tunggu jawaban] Apakah baru-baru ini ibu pernah diajak diskusi oleh staf kami yang melakukan survey korupsi?

Ibu masih ingat enggak siapa namanya? [Kalau yang bersangkutan ingat, itu bagus, kalau tidak ingat, cobalah memverifikasi dengan variabel lain seperti jenis kelamin surveyor atau ciri-ciri lainnya]

Ada ga kesan-kesan khusus yang ingin ibu sampaikan, baik itu terkait dengan topik survey atau apa saja?

Baik, Ibu... terima kasih banyak Bu ya, sudah membantu staf kami. Semua jawaban yang ibu berikan itu, kami simpan dengan rapi, dan tidak ada orang yang tahu. Kami menjadikan jawaban itu sebagai kajian untuk memperbaiki kinerja daerah kita. Semua jawaban, kontribusi dan kerjasama yang ibu

berikan

akan sangat berguna bagi Aceh. Salam untuk keluarga dan semua ya, Bu...
Assalamu 'alaikum.

Untuk memverifikasi enumerator

Pertanyaan kunci yang ingin digali adalah Apakah ada melakukan survey.

Langkah-Langkah yang dilakukan :

- a. Mulai dengan salam
- b. Verifikasi nama orang yang ingin diajak bicara [Nama dan jenis kelamin sudah bisa diidentifikasi dari awal sebelum menelepon]
- c. Perkenalkan diri sebagai Staf Transparency International (TI) yang sedang melakukan evaluasi program Aceh Institute.
- d. Bangun sedikit rapport [kesan bersahabat untuk membangun trust dan kenyamanan]
- e. Masuk ke pertanyaan
- f. Ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap program ini.

Catatan: Kalau bisa menggunakan bahasa lokal [Aceh, Jamee, Gayo, atau Alas dan lain-lain akan lebih baik]

Contoh:

Assalaamu alaikum... Bang.

Boleh bicara dengan Bang Saiful? [Kalau yang bersangkutan adalah Saiful, maka langsung masuk ke tahap selanjutnya, bila bukan Saiful, maka mohon disambungkan untuk berbicara dengan Beliau]

Apa kabar, Bang? [tunggu jawaban] mohon maaf nih... sedikit mengganggu... saya Udin dari Transparency International (TI), saya hanya mau mendengar cerita dan kesan abang selama proses pengambilan data lapangan untuk Survey Barometer Korupsi Aceh yang dilakukan atas kerjasama Aceh Institute dan Transparency International... Ada waktu 2 menit untuk ngobrol2 kan, Bang?

Dulu abang ditugaskan untuk Kab/Kota apa, Bang?

Masih ingat enggak 2 atau 3 nama yang pernah abang wawancarai? [Kalau ingat itu bagus, kalau tidak ingat, beri aja dia waktu kalau dia mau ambil catatan pribadi]

Ada ga kesan-kesan khusus yang ingin abang sampaikan selama proses survey berlangsung?

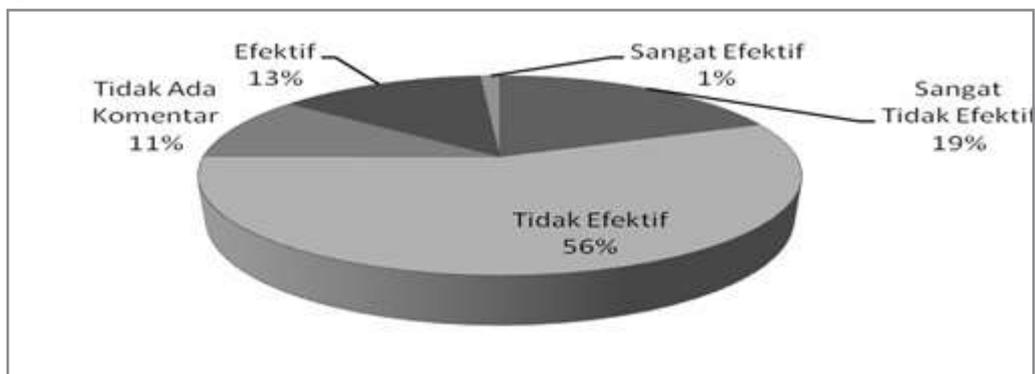
Baik, Bang... terima kasih banyak ya atas waktu dan kerjasama yang abang berikan. Kami percaya akan sangat berguna untuk menata Aceh yang bebas korupsi ke depan. Assalamu 'alaikum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

III. 1. Performa Pemerintahan

Merujuk pada tampilan jawaban seluruh responden, maka terlihat bahwa mayoritas responden menilai performa pemerintahan eksekutif pada level propinsi bisa disimpulkan Sangat Buruk. 75% responden dari total 2.140 responden menilai kinerja mereka Tidak Efektif, bahkan 19% dari total 75% itu menilai secara lebih ekstrim lagi yaitu Sangat Tidak Efektif. Sebuah jawaban yang meninggalkan keprihatinan dan sekaligus tantangan, seperti yang terlihat pada gambar-1 dibawah:

Gambar-1: Prestasi Pemerintah Eksekutif Propinsi Aceh dalam Pemberantasan Korupsi



Jawaban ini bisa dimaklumi, mengingat periodisasi pemerintahan saat ini (2006 - 2011) menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Harus kita akui, fenomena mengakarnya korupsi di Aceh tidak hanya terjadi dalam pemerintahan periode ini saja, namun sudah berlangsung dalam beberapa kali periodisasi pemerintahan sebelumnya. Artinya apa yang sedang berjalan lebih merupakan warisan politik yang sudah berurat-berakar dan membutuhkan waktu ekstra untuk melakukan pembenahan secara total.

Sayangnya kondisi lapangan tidak berjalan mulus bagi Aceh yang sedang meniti transisi dari periode konflik ke periode damai. Periode transisi membutuhkan konsentrasi lebih, tidak hanya untuk menata pemerintahan dalam konteks pembangunan (*developmentalism*) dan stabilisasi pemerintahan, tetapi juga

membutuhkan waktu yang konsisten dalam menyelesaikan beberapa program yang bersifat emergensia terkait dengan penyegeraan realisasi butir-butir kesepakatan MoU Helsinki 2005 dan UUPA 2006.

Sejauh ini kita melihat adanya niat baik dari Pemerintah Aceh. Salah satunya ditunjukkan dengan pendirian Tim Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) oleh Gubernur Irwandi pada tahun 2007. TAKPA mendapat mandat untuk melakukan serangkaian aktivitas yang mencakup 3 hal sebagai berikut (1) membantu pemerintah dalam penyelamatan dan inventarisasi aset-aset pemerintahan propinsi; (2) membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Aceh; dan (3) membantu pemerintah dalam mempercepat koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka tindak lanjut penindakan kasus-kasus korupsi.

TAKPA yang dipimpin oleh Tgk. Ridwan Muhammad telah melakukan beberapa terobosan program strategis, misalnya atas fasilitasi dari Tgk. Nashiruddin Bin Ahmed - tokoh senior GAM—TAKPA dipertemukan dengan Transparency International Indonesia (TII) untuk saling bekerjasama dalam menggalang program penciptaan pemerintahan yang bersih. Sayangnya tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari beberapa kali pertemuan pendahuluan tersebut. Kecuali hanya berpartisipasi dalam kegiatan Deklarasi Pakta Integritas di Bireun dan Pidie bersama Bapak Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus TII.

Gubernur Irwandi sangat berharap pada peran strategis TAKPA ini, karena faktanya tidak ada pemerintahan eksekutif propinsi lain di Indonesia yang memiliki badan khusus yang diberi mandat untuk melakukan pemantauan kinerja pemerintahan dan pemantapan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

Hingga beberapa titik performa TAKPA memang terlihat belum maksimal. Hal ini diakui oleh Ketua TAKPA dalam sebuah pertemuan di Hermes pada tahun 2008 yang salahsatunya dikarenakan oleh pendekatan yang selama ini kurang strategis. Beberapa agenda yang belum sempat direalisasikan oleh TAKPA adalah perluasan pembentukan Komite Rakyat Pemantau yang sebelumnya sudah pernah diwacanakan bersama TII. Jangkauan TI hanya mampu mencakup beberapa kecamatan dalam beberapa kabupaten saja [misalnya di Bireuen hanya mampu meng-cover 3 kecamatan saja -Jeunib, Samalanga dan Simpang Mamplam-- dari total 17 kecamatan yang ada di Bireuen].

Dalam rangka evaluasi kinerja kepengurusan, seiring dengan berakhirnya kontrak dukungan operasional dari UNDP, dalam tiga bulan terakhir telah dilakukan restrukturisasi kepengurusan di lingkungan TAKPA. TAKPA hari ini dipimpin oleh saudara Amrizal J. Prang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

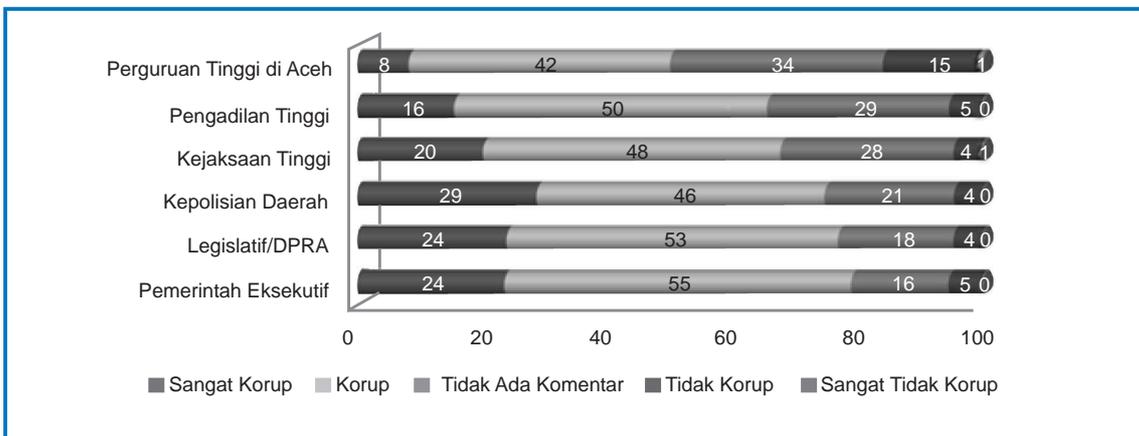
Terkait dengan belum maksimalnya performa pemerintah eksekutif propinsi, maka sudah bisa dibayangkan kondisi keprihatinan dari beberapa lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan Aceh. Responden menilai kinerja enam lembaga -sesuai pilihan jawaban yang ada—adalah berwajah korup dengan prosentase sebagai berikut:

1. Pemerintahan Eksekutif [79%]
2. Legislatif/DPRA [77%]
3. Kepolisian [75%]
4. Kejaksaan Tinggi [68%]
5. Pengadilan Tinggi [66%]
6. Perguruan Tinggi [50%]

Seperti juga halnya warisan mentalitas, maka performa lembaga-lembaga pemerintahan ini juga dililit oleh masalah. Seperti masih adanya praktek jual beli project, kesepakatan diluar ruangan, lobi-lobi informal, jual-beli kasus dan semua proses-proses dibelakang meja yang terjadi di lingkungan lembaga-lembaga seperti DPRA, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perguruan Tinggi. Laporan ini muncul dalam bentuk pengalaman pribadi setiap warga ketika berhubungan atau berurusan dengan lembaga-lembaga tersebut. Hingga beberapa titik dan dalam banyak hal, temuan-temuan ini konsisten dengan fakta kinerja pemerintahan pada level nasional.

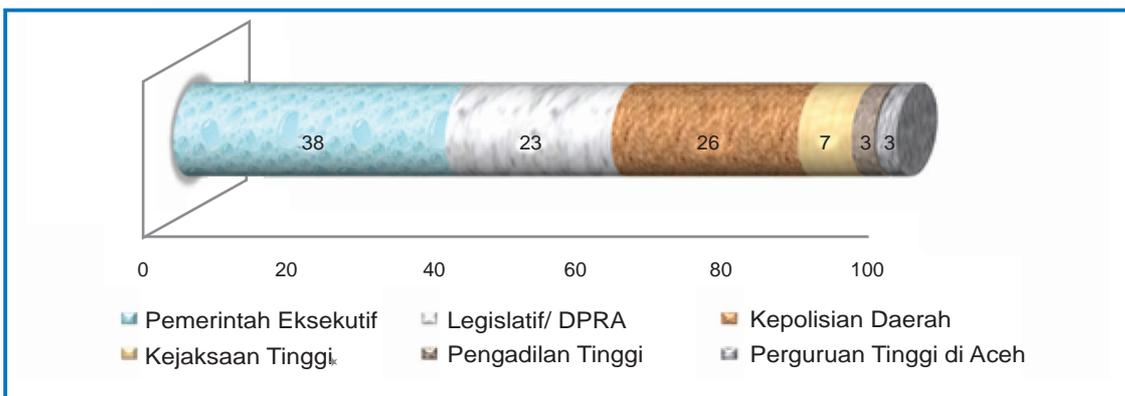
Bisa disimpulkan secara umum bahwa kinerja lembaga-lembaga pemerintahan -yang berurusan dengan kepentingan publik— masih jauh dari kondisi ideal dan membutuhkan dukungan peningkatan yang serius. Gambaran yang lebih detil tentang kinerja tersebut bisa dilihat dalam gambar-2 dibawah ini:

Gambar-2: Persepsi terhadap Kinerja Lembaga-Lembaga Pemerintah di Aceh



Maka konsisten dengan stratifikasi diatas, mayoritas responden menempatkan Pemerintahan Eksekutif pada level pertama sebagai lembaga yang paling korup (38%), disusul oleh Kepolisian (26%) dan Legislatif Propinsi/DPRA (23%), seperti yang bisa dilihat dari gambar-3 dibawah ini ¹:

Gambar-3: Stratifikasi Tingkat Korupsi Lembaga-Lembaga yang Ada



III. 2. Apakah Kondisi Hari Ini Lebih Baik?

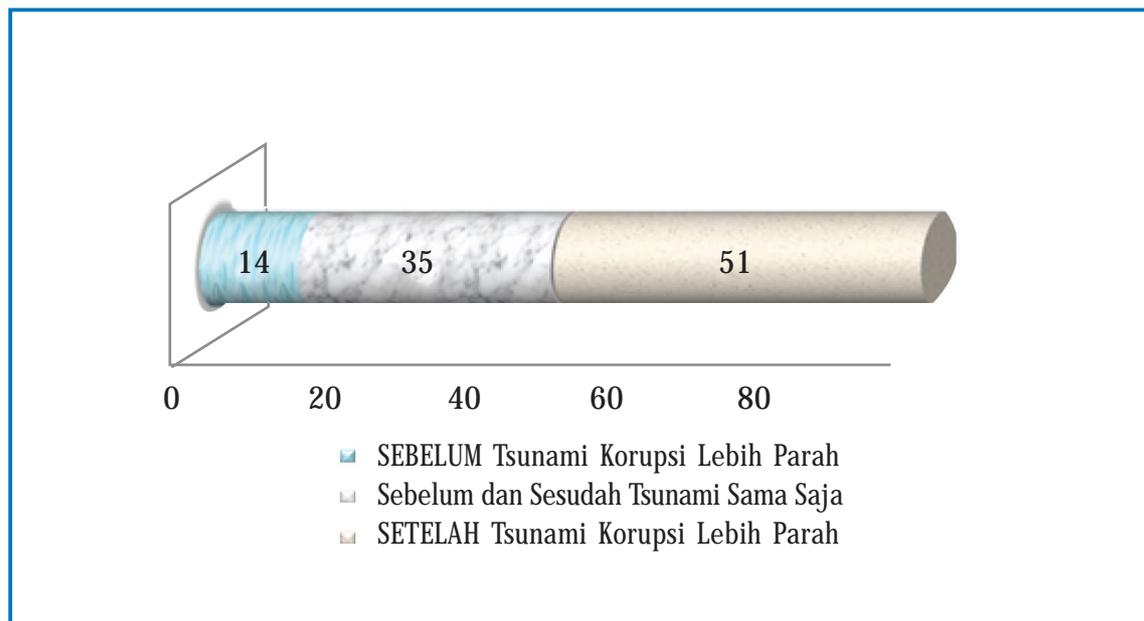
Seperti yang sudah diilustrasikan diatas bahwa kondisi hari ini tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak serta merta juga menjadi akut. Kondisi hari ini adalah kondisi yang sudah terjadi dari masa-masa pemerintahan sebelumnya, hanya saja pemerintahan *“diri sendiri”* terbukti belum terlihat memiliki cukup *morale* untuk bisa mengawal ke arah yang lebih baik.

¹ Stratifikasi ini juga dipengaruhi oleh faktor pemberitaan media dimana ketiga lembaga tersebut lebih banyak mendapat sorotan publik dalam kinerja-kinerjanya yang relatif minus dalam pandangan warga

Hal ini diperburuk oleh beberapa faktor eksternal yang ada, salah satunya adalah musibah gempa dan tsunami Desember 2004. Peristiwa tsunami pada faktanya telah membuka Aceh bagi dunia internasional khususnya dalam proses membangun kembali area-area yang hancur tersapu gelombang tsunami itu. Seiring dengan keterlibatan komunitas internasional itu dana pun mengalir lebih banyak ke Aceh. Aliran dana yang lebih banyak itu, pada satu sisi telah banyak memberi kontribusi bagi perbaikan infrastruktur di Aceh baik yang bersifat fisik, maupun yang non-fisik. Namun yang menarik perhatian warga bahwa dalam banyak kasus, aliran dana yang didistribusikanpun juga menyimpan masalah, salah satunya soal transparansi bantuan. Maka tidak heran bila kita masih mendapati ada project yang ditelantarkan oleh pengembang, atau program yang tidak tepat sasaran dan peruntukan, karena pada dasarnya beberapa proses tender juga tidak dilakukan secara transparan, disamping ketiadaan evaluasi atas kinerja para pengembang di lapangan.

Semua ini hanya beberapa alasan yang disampaikan oleh para responden yang mayoritas menilai bahwa iklim korupsi paska tsunami malah Lebih Parah (51%). Secara detil bisa dilihat dalam gambar-4 dibawah:

Gambar-4. Wajah korupsi sebelum dan setelah tsunami

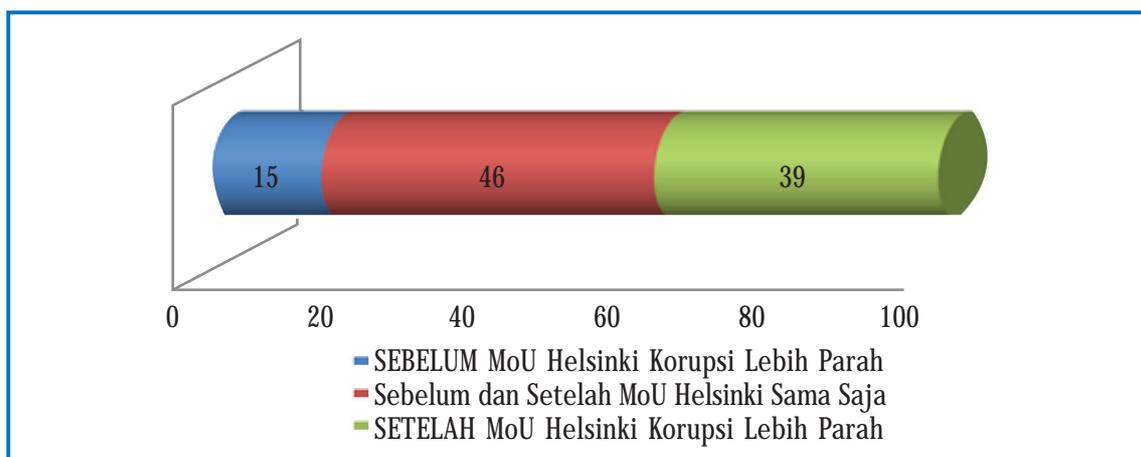


Kondisi yang hampir sama kita lihat ketika membandingkan fenomena korupsi antara sebelum dan sesudah perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005. Sebagaimana yang kita ketahui, paska perjanjian damai tersebut, kondisi di Aceh relatif berubah drastis dengan adanya pemberian status otonomi khusus (*self government*) untuk Aceh. Berturut-turut dalam konteks ketatapemerintahan, kepemimpinan eksekutif maupun legislatif Aceh dipimpin oleh putra daerah.

Pilkada 2006 telah menempatkan kandidat independen dan para mantan kombatan ke kursi orang nomor satu di Aceh dan relatif menguasai 8 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Pemilu legislatif 2009 juga telah menempatkan Partai Aceh (PA) sebagai pemegang mandat mayoritas dengan menguasai 48% suara di Parlemen Provinsi dan relatif 50% hingga 70% kursi di parlemen kabupaten/kota.

Dalam persepsi masyarakat, perubahan peta geopolitik tersebut tidak serta merta merubah iklim pemerintahan daerah menjadi bersih secara signifikan. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang menyatakan bahwa kondisi yang ada ternyata Sama Saja antara sebelum dan sesudah MoU Helsinki (46%), bahkan diikuti oleh pernyataan kondisi malah Bertambah Buruk yang dipilih oleh responden sejumlah 39%. Lebih detail bisa dilihat dalam gambar-5 dibawah ini:

Gambar-5: Kondisi Korupsi Sebelum dan Setelah MoU Helsinki



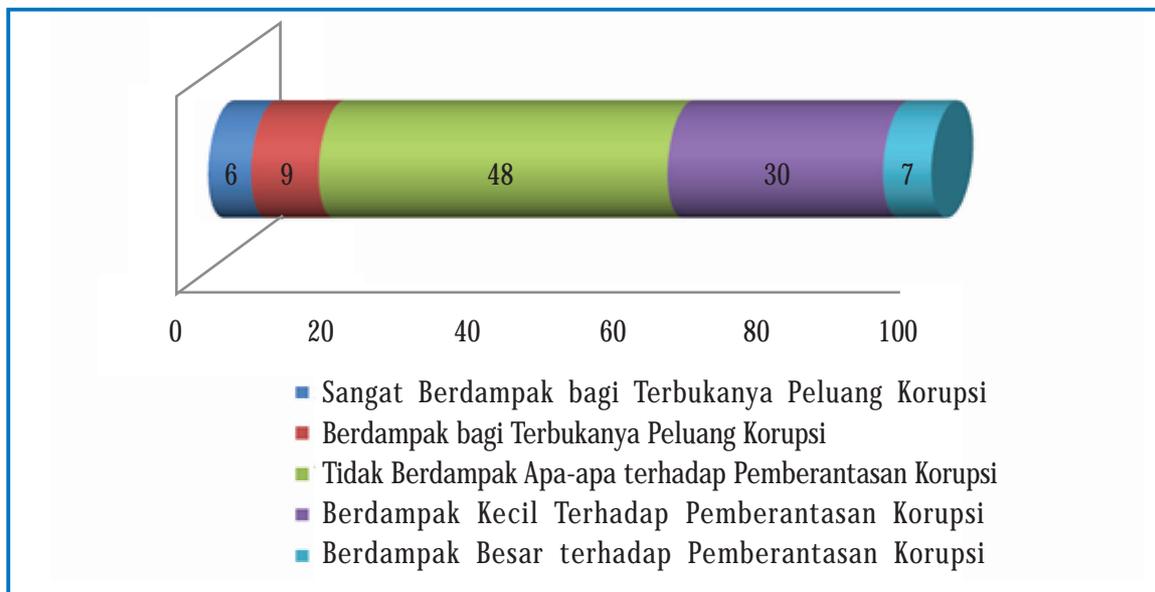
III. 3. Apakah Qanun Merubah Keadaan?

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka dibentuklah qanun-qanun. Tujuannya agar UUPA lebih operasional setelah didukung oleh seperangkat perundang-undangan lain, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan lain-lain. Namun sayangnya produksi qanun yang cukup eksekutif -pada tahun

2007 ada 10 qanun, tahun 2008 ada 12 qanun dan tahun 2009 ada 6 qanun—ini belum bisa mendongkrak lahirnya pemerintahan yang bersih². Hal ini bisa dimaklumi karena dari total 28 produk qanun, hanya satu qanun saja yang memiliki korelasi langsung dengan agenda pemberantasan korupsi, yaitu Qanun nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, sisanya hanyalah qanun-qanun yang lebih berorientasi pada penataan kinerja internal *[lebih detail lihat catatan kaki]*.

Hal ini sejalan dengan jawaban mayoritas responden bahwa Tidak Ada Perubahan atau Tidak Ada Korelasi antara penerapan qanun-qanun tersebut dengan upaya pemberantas korupsi (48%). Berturut-turut diikuti dengan asumsi bahwa walaupun terjadi perubahan maka perubahan tersebut Sangat Kecil (30%). Jawaban selengkapnya bisa dilihat pada gambar-6 dibawah ini

Gambar-6: Hubungan penerapan qanun terbaru terhadap pemberantasan korupsi



² Qanun-qanun 2007 ada 10: 01 tentang APBA 2007; 02 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA; 03 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; 04 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Aceh; 05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD; 06 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2007; 07 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh; 08 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal; 09 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang; dan 10 tentang Baitul Mal.

Qanun-qanun 2008 ada 12: Tahun tentang Keuangan Aceh; 02 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil dan Penguasaan Dana Otsus; 03 tentang Partai Lokal, Anggota DPRA dan DPRK; 04 tentang APBA Tahun 2008; 05 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 06 tentang Administrasi Pendudukan; 07 tentang Perubahan APBA Tahun 2008; 08 tentang Pelayanan Publik; 09 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; 10 tentang Lembaga Adat; 11 tentang Perlindungan Anak; dan 12 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

sQanun-qanun 2009 ada 6: 01 tentang APBA 2009; 02 tentang MPU; 03 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim; 04 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik; 05 tentang Penanaman Modal; dan 06 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

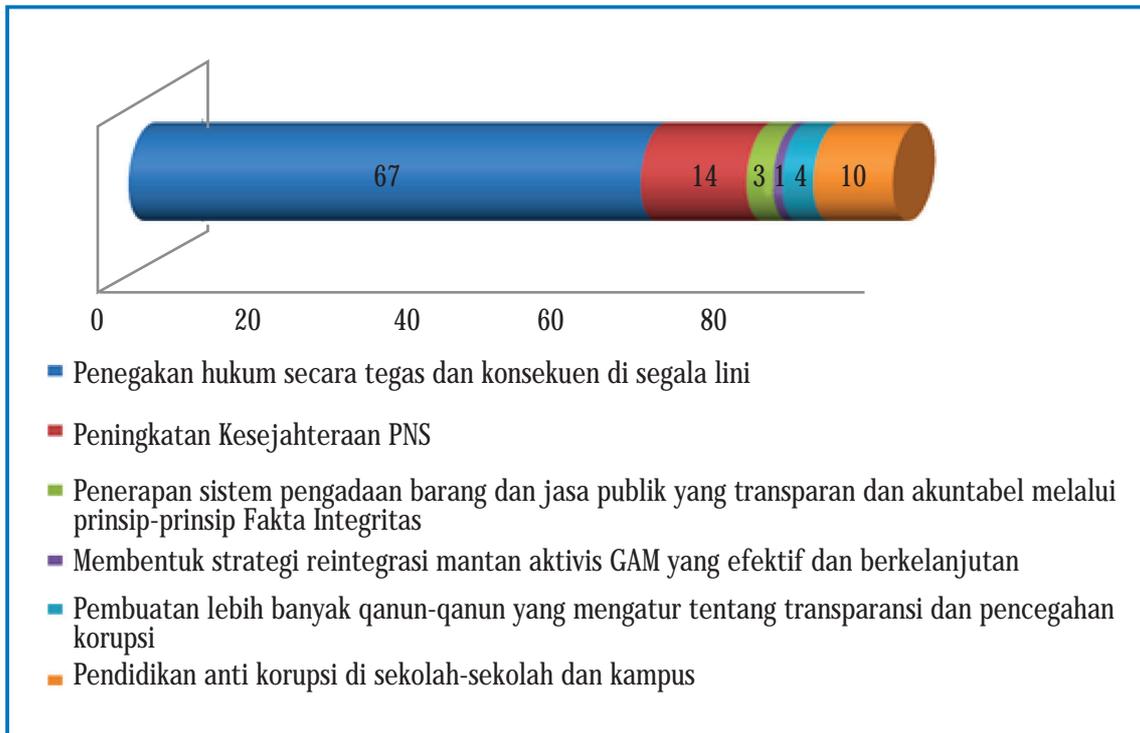
III. 4. Solusi dan Rekomendasi

Tiga usulan prioritas yang dipilih oleh para 2.140 responden dalam survey ini, dari beberapa usulan rencana aksi adalah:

1. Adanya penegakan hukum (67%). Opsi ini dipilih secara mayoritas dan mutlak, karena dalam persepsi responden hal inilah yang selama ini menjadi penghalang utama dalam upaya penanggulangan korupsi. Praktek KKN masih terjadi antara lembaga pemerintah dan *stakeholder* kebijakan yang notabene merugikan warga. Faktanya hingga hari ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal ketegasan aparaturnya dalam penindakan para pelaku dan pelanggaran hukum.
2. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (14%). Hingga beberapa titik harus diakui bahwa kesejahteraan PNS memang masih berada diambang batas kebutuhan minimum yang berpotensi untuk terjadinya praktek-praktek korupsi.
3. Pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus (10%). Langkah preventif ini dianggap sebagai langkah yang strategis sebab perubahan perilaku korupsi terkait dengan perubahan *mind-set* aparat pemerintah dan para pejabat pemerintah dalam melihat masalah pelanggaran dan masalah tindakan penyelesaiannya. Diharapkan akan lahir generasi kedua atau ketiga yang lebih mapan dalam membangun budaya bebas korupsi. Hal ini tentunya harus disertai dengan adanya keterlibatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan atau pemantauan pembangunan (*participatory approach*). Karena itu ide untuk terus mengkampanyekan muatan dari Pakta Integritas kepada seluruh warga menjadi penting. Agar konsep ini tidak hanya difahami sebagai sebuah teori dan defenisi saja, tetapi juga menjadi bagian dari aksi pemberantasan korupsi yang dipakai oleh seluruh masyarakat. Cukup membanggakan ketika penerapan Pakta Integritas ini mendapat sambutan positif dari Bapak Gubernur dan beberapa kepala daerah Kabupaten/Kota. Bahkan lebih jauh, Gubernur mendorong dan merekomendasikan seluruh kepala daerah untuk belajar, mendalami lebih jauh, dan mendukung keberhasilan Pakta Integritas tersebut.

Keseluruhan opsi yang direkomendasikan sebagai agenda penanggulangan korupsi oleh total 2.140 responden survey dapat dilihat dalam gambar-7 dibawah ini:

Gambar-7: Skala prioritas penanggulangan korupsi



Tabel 1. Data Total Responden, Jenis Kelamin (n dan %), dan Rata-rata Usia berdasarkan Kabupaten atau Kota

No	Kabupaten/ Kota	Total Responden	Jenis Kelamin		Rata-rata Usia
			Laki-laki	Perempuan	
1	Banda Aceh	200	106 53	94 47	33
2	Aceh Besar	192	108 56	84 44	37
3	Sabang	100	49 49	51 51	29
4	Pidie	100	51 51	49 49	30
5	Bireun	100	53 53	47 47	30
6	Aceh Utara	80	40 50	40 50	30
7	Lhoksemawe	80	43 54	37 46	30
8	Aceh Timur	80	42 53	38 48	33
9	Aceh Jaya	90	54 60	36 40	30
10	Aceh Selatan	86	67 78	19 22	31
11	Aceh Barat	77	53 69	24 31	38
12	Pidie Jaya	80	49 61	31 39	34
13	Bener Meriah	80	42 53	38 48	31
14	Aceh Tengah	80	42 53	38 48	34
15	Gayo Lues	80	42 53	38 48	33
16	Aceh Tenggara	80	41 51	39 49	32
17	Langsa	81	44 54	37 46	31
18	Aceh Tamiang	78	41 53	37 47	31
19	Singkil	80	48 60	32 40	29
20	Subulussalam	80	57 71	23 29	29
21	Simeulue	75	53 71	22 29	35
22	Aceh Barat Daya	80	50 63	30 38	30
23	Nagan Raya	81	46 57	35 43	36
	TOTAL	2140	1221 57	919 43	32

Tabel 2. Data Profesi Responden berdasarkan Kabupaten atau Kota

No	Kabupaten/ Kota		Profesi						TOTAL
			Mahasiswa/ Pelajar	PNS	Swasta/ Wirausaha	TNI/ Polri	Tokoh	Tidak Bekerja	
1	Banda Aceh	n	40	41	40	11	49	19	200
		%	20	21	20	6	25	10	100
2	Aceh Besar	n	40	37	40	5	49	21	192
		%	21	19	21	3	26	11	100
3	Sabang	n	20	20	20	5	25	10	100
		%	20	20	20	5	25	10	100
4	Pidie	n	20	20	20	5	25	10	100
		%	20	20	20	5	25	10	100
5	Bireun	n	20	20	20	5	25	10	100
		%	20	20	20	5	25	10	100
6	Aceh Utara	n	16	16	16	4	20	8	80
		%	20	20	20	5	25	10	100
7	Lhoksemawe	n	16	16	17	4	19	8	80
		%	20	20	21	5	24	10	100
8	Aceh Timur	n	17	15	16	4	20	8	80
		%	21	19	20	5	25	10	100
9	Aceh Jaya	n	16	19	21	4	21	9	90
		%	18	21	23	4	23	10	100
10	Aceh Selatan	n	20	16	17	4	21	8	86
		%	23	19	20	5	24	9	100
11	Aceh Barat	n	14	13	14	1	21	14	77
		%	18	17	18	1	27	18	100
12	Pidie Jaya	n	16	16	16	4	20	8	80
		%	20	20	20	5	25	10	100
13	Bener Meriah	n	17	16	16	4	20	7	80
		%	21	20	20	5	25	9	100
14	Aceh Tengah	n	16	16	16	4	20	8	80
		%	20	20	20	5	25	10	100
15	Gayo Lues	n	11	18	17	4	22	8	80
		%	14	23	21	5	28	10	100
16	Aceh Tenggara	n	14	17	17	4	20	8	80
		%	18	21	21	5	25	10	100
17	Langsa	n	16	16	16	4	20	9	81
		%	20	20	20	5	25	11	100
18	Aceh Tamiang	n	16	16	16	2	20	8	78
		%	21	21	21	3	26	10	100
19	Singkil	n	16	16	16	4	20	8	80
		%	20	20	20	5	25	10	100
20	Subulussalam	n	16	17	16	4	19	8	80
		%	20	21	20	5	24	10	100
21	Simeulue	n	16	16	16	0	19	8	75
		%	21	21	21	0	25	11	100
22	Aceh Barat Daya	n	19	19	19	4	13	6	80
		%	24	24	24	5	16	8	100
23	Nagan Raya	n	16	19	17	2	19	8	81
		%	20	23	21	2	23	10	100
TOTAL		n	428	435	439	92	527	219	2 140
		%	20	20	21	4	25	10	100

Tabel 3. Data Pendidikan Responden berdasarkan Kabupaten atau Kota

No	Kabupaten/ Kota		Pendidikan					TOTAL	
			Tidak Sekolah	Lulusan SD	Lulusan SMP	Lulusan SMA	Lulusan S1		Lulusan Pascasarjana
1	Banda Aceh	n	0	0	7	89	87	16	199
		%	0	0	4	45	44	8	100
2	Aceh Besar	n	1	0	9	102	68	11	191
		%	1	0	5	53	36	6	100
3	Sabang	n	0	2	22	43	33	0	100
		%	0	2	22	43	33	0	100
4	Pidie	n	1	2	13	53	28	3	100
		%	1	2	13	53	28	3	100
5	Bireun	n	1	0	14	54	31	0	100
		%	1	0	14	54	31	0	100
6	Aceh Utara	n	0	0	4	44	30	1	79
		%	0	0	5	56	38	1	100
7	Lhoksemawe	n	0	0	2	42	30	2	76
		%	0	0	3	55	39	3	100
8	Aceh Timur	n	0	1	10	43	24	0	78
		%	0	1	13	55	31	0	100
9	Aceh Jaya	n	0	9	3	49	27	2	90
		%	0	10	3	54	30	2	100
10	Aceh Selatan	n	0	0	4	50	31	1	86
		%	0	0	5	58	36	1	100
11	Aceh Barat	n	0	11	9	36	18	0	74
		%	0	15	12	49	24	0	100
12	Pidie Jaya	n	0	2	10	44	23	1	80
		%	0	3	13	55	29	1	100
13	Bener Meriah	n	1	0	14	32	31	2	80
		%	1	0	18	40	39	3	100
14	Aceh Tengah	n	0	0	2	43	31	4	80
		%	0	0	3	54	39	5	100
15	Gayo Lues	n	0	0	1	53	26	0	80
		%	0	0	1	66	33	0	100
16	Aceh Tenggara	n	0	1	13	42	23	1	80
		%	0	1	16	53	29	1	100
17	Langsa	n	0	0	1	48	30	1	80
		%	0	0	1	60	38	1	100
18	Aceh Tamiang	n	0	2	3	37	34	1	77
		%	0	3	4	48	44	1	100
19	Singkil	n	0	3	15	55	7	0	80
		%	0	4	19	69	9	0	100
20	Subulussalam	n	0	2	7	49	20	0	78
		%	0	3	9	63	26	0	100
21	Simeulue	n	2	2	12	33	25	1	75
		%	3	3	16	44	33	1	100
22	Aceh Barat Daya	n	2	2	10	54	12	0	80
		%	3	3	13	68	15	0	100
23	Nagan Raya	n	0	1	6	54	18	2	81
		%	0	1	7	67	22	2	100
TOTAL		n	8	40	191	1149	687	49	2124
		%	0	2	9	54	32	2	100